

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan perbankan adalah salah satu industri yang ikut berperan serta dalam pasar modal, seperti industri lainnya adalah industri manufaktur, pertanian, pertambangan, properti dan lain-lain. Perusahaan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), selain itu perusahaan perbankan juga sebagai lembaga yang memperlancar lalu lintas pembayaran. Tujuan utama didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menaksir kinerja perusahaan adalah informasi laba. Bagi pemegang saham, laba berarti peningkatan nilai ekonomis (*wealth*) yang akan diterima melalui pembagian dividen, serta dianggap mempunyai informasi yang dapat menganalisis dan memprediksi saham yang diterbitkan oleh emiten. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat digunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan. Oleh karena itu informasi laba yang disajikan harus berkualitas (Yessi Arifina, 2017).Laba yang kurang berkualitas biasanya terjadi karena dalam menjalankan bisnis perusahaan, manajemen

bukan pemilik perusahaan. Pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik. Pemikiran bahwa pihak manajemen dapat melakukan tindakan yang hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri didasarkan pada suatu asumsi yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai perilaku yang mementingkan diri sendiri.

Hal tersebut mengakibatkan terjadinya konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan, konflik yang terjadi akibat pemisahan kepemilikan ini disebut konflik keagenan. Dengan adanya konflik keagenan ini mengakibatkan pihak manajemen perusahaan melakukan praktik manajemen laba. Manajemen laba mengakibatkan informasi laba yang disajikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga kualitas laba yang dihasilkan juga rendah. Rendahnya kualitas laba dapat menurunkan nilai perusahaan di pasar. Teori keagenan adalah suatu kontrak antara prinsipal dengan agen. Weston dan Brigham (1993:17) menjelaskan bahwa hubungan keagenan yang terjadi ketika seseorang (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) yang kemudian diberikan wewenang dalam mengambil keputusan. Sering terjadinya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajer, hal ini terjadi karena adanya pemisah antara pemilik dengan manajer atau yang mengendalikan, oleh karena itu pemegang saham selaku pemilik harus selalu memonitor tindakan yang dilakukan oleh manajer agar manajer selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemilik.

Hal senada juga diungkapkan Jensen and Meckling (1976) yaitu hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara principal yang menyewa orang lain atau agent untuk melaksanakan jasa dan mengambil keputusan yang telah didelegasikan kepadanya. Cara yang dilakukan untuk memonitor manajer adalah dengan adanya *Corporate Governance*. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* adalah dengan *transparancy* *accountability*, *responsibility*, *indepency*, *fairness*.

*Corporate Governance* pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya di Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (King dan Levine dalam Sami'ani, 2008). Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank (Arun, Turner 2003 dalam Supriyatno, 2006).

*Good Corporate Governance* sangatlah erat dengan pendekatan keagenan, dimana sering terjadi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham karena terjadinya perbedaaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut *agency conflict*. Terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1990 di negara negara

Asia, mendasari pemerintah Indonesia membentuk *Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)*. Muncul inisiatif untuk menguatkan kerangka *Good Corporate Governance (GCG)*. GCG kembali diulas dan dibenahi peraturan penerapannya (dilakukan reformasi GCG) di Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 dan terjadinya kasus yang melibatkan perusahaan besar dan KAP ternama yaitu Enron dan Arthur Andersen. Dalam upaya mengatasi dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemegang saham, perlu dilakukan pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Salah satu bentuk pengawasan adalah dengan adanya mekanisme *Good Corporate Governance* (Juwitasari, 2008). Berbagai penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* yang baik tersebut perlu ditegakkan dalam rangka pencapaian kinerja keuangan perusahaan yang maksimal. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* membutuhkan pihak atau kelompok untuk memonitor implementasi kebijakan direksi, oleh karena itu dewan komisaris independen merupakan bagian pokok dari mekanisme *corporate governance*.

Peran dewan komisaris independen adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen. Komposisi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, audit eksternal dan sistem pengendalian internal. Keberadaan komite audit di Indonesia

diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Menurut Peraturan BAPEPAM Kep 29/PM/2004 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 menyatakan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan dua anggota lainnya berasal dari luar perusahaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Dewan komisaris independen memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Sam'ani, 2008). Selain dewan komisaris independen, struktur kepemilikan saham yang terdiri atas kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, juga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerapan *good corporate governance*.

Pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan oleh manajer akan lebih ketat ketika kepemilikan saham terkonsentrasi. Dengan adanya kepemilikan saham terkonsentrasi maka keragaman kepentingan pemegang saham berkurang, sehingga ada kemungkinan tercipta kerja sama antara pihak manajer dan pemegang saham untuk meningkatkan nilai perusahaan (Puspitasari dan Ernawati, 2010).

Pengawasan yang tidak efektif dari dewan komisaris akan terjadi masalah keagenan yakni dengan makin banyaknya dewan komisaris maka perusahaan ini akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses komunikasi, koordinasi tugas tugas serta efektifitas dalam pembuatan keputusan. Karena semakin besar jumlah dewan komisaris maka akan semakin sulit, serta mahal dan memakan waktu lama baik dalam hal komunikasi, maupun koordinasi dalam pembuatan keputusan (Yermack 1996, Jensen 1993). Yermack (1996) juga mengungkapkan semakin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan. Conyon dan Peck (1998) menjelaskan bahwa terdapat hubungan negative antara ROE dengan jumlah dewan komisaris. De Andres et al (2005) mengatakan hal yang sama didalam penelitiannya terdapat hubungan negatif antara nilai perusahaan dengan jumlah dewan komisaris. Berbeda dengan yang diteliti oleh Dalton (1999) menjelaskan bahwa semakin tinggi dewan komisaris di dalam perusahaan maka semakin baik. Karena semakin banyak yang memonitor tingkah laku manajemen sehingga akan selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Pentingnya kinerja keuangan bagi perusahaan adalah untuk mengukur seberapa jauh keefektifan perusahaan dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan laba. Kinerja keuangan adalah prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan (Mulyadi, 2001). Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan, sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar dan kinerja keuangan yang baik. Alternatif lain yang dapat digunakan investor untuk mengetahui kinerja keuangan sebuah perusahaan, adalah dengan menghitung rasio Tobin's Q.

Tobin's Q merupakan ukuran yang lebih teliti karena memberikan gambaran yang tidak hanya pada aspek fundamental, namun juga sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai aspek yang dilihat oleh pihak luar termasuk investor (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Analisis rasio keuangan dibagi kedalam tiga area penting yang diproksikan oleh tiga variabel kinerja keuangan yaitu ROA, ROE, dan Tobin's Q. *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) adalah dua ukuran kinerja keuangan berdasarkan pendekatan akuntansi, sedangkan Tobin's Q merupakan pengukuran kinerja keuangan pendekatan pasar. Namun variabel Tobin's Q

cenderung lebih objektif dibanding ukuran berdasarkan pendekatan akuntansi, serta dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkontrol.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimanadewan komisaris dan komite-komite dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, maka penulis bermaksud untuk mengangkat judul penelitian:

**“Independen Dewan Komisaris Dan Komite-Komite Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan (Tobin’s Q) Pada Industri Perbankan Tahun 2013-2015”**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada Industri Perbankan?
2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada Industri Perbankan?
3. Apakah komite pemantau risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada Industri Perbankan?
4. Apakah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan pada Industri Perbankan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan pada Industri Perbankan.
2. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan pada Industri Perbankan.
3. Untuk menguji pengaruh komite pemantau risiko terhadap kinerja perusahaan pada Industri Perbankan.
4. Untuk menguji pengaruh komite remunerasi dan nominasi terhadap kinerja perusahaan pada Industri Perbankan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Peneliti**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami tentang kinerja perusahaan yang dipengaruhi dewan komisaris independen dan komite-komite dewan komisaris yang berada di Industri Perbankan.

#### **2. Bagi Perusahaan**

Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk menentukan sistem kinerja perusahaan pada industri perbankan agar

kinerja yang didapatkan lebih efisien dan menghasilkan tujuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan.

### **3. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pengaruh dewan komisaris independen dan komite-komite dewan komisaris sekaligus menjadi referensi bagi peneliti lain untuk penelitian di masa yang akan datang khususnya untuk penelitian terhadap topik yang berhubungan dengan kinerja perusahaan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang penelitian. Kemudian masalah penelitian diidentifikasi berdasarkan latar belakang penelitian. Terakhir, bab ini berisi tujuan dan manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua berisi landasan teori yang mendukung penelitian ini. Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian, hasil dari

penelitian sebelumnya, model penelitian dan hipotesis atau jawaban sementara yang harus diuji secara empiris.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga menjelaskan bentuk penelitian, obyek penelitian meliputi populasi, metode sampling dan sampel. Bab ini juga menjelaskan definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hipotesis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis data. Bab ini menjelaskan tentang pemilihan sampel pada penelitian ini dan statistik deskriptif objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini juga disajikan hasil dari statistik deskripsi, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda.

### **BAB V PENUTUP**

Bab terakhir dari penelitian ini memberikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya. Bab ini menjelaskan juga mengenai keterbatasan pada saat penelitian dilakukan. Dengan mengetahui keterbatasan pada penelitian, dapat diberikan rekomendasi untuk penelitian di masa yang akan datang.